

ABSTRAK

Hukum pidana internasional mengenal istilah Negara Peserta Statuta Roma 1998 (negara pihak) dan Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998 (negara bukan pihak). Negara pihak merupakan negara yang tunduk dan terikat dengan Statuta Roma 1998, apabila kejahatan internasional (kejahatan paling serius) terjadi di negara pihak, maka *International Criminal Court* dapat ikut mengadili pelaku jika negara itu tidak mau atau tidak mampu untuk mengadili. Berbeda dengan negara bukan pihak, negara ini tidak terikat dan tidak tunduk pada Statuta Roma 1998 sehingga hal itu menyulitkan *International Criminal Court* untuk ikut mengadili pelaku kejahatan internasional dari Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998 atau negara bukan pihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *International Criminal Court* dalam menanggapi kejahatan internasional khususnya terhadap Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998 yang terjadi setelah berlakunya Statuta Roma 1998 dan tindakan negara-negara korban kejahatan internasional atas perbuatan pelaku dari Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *International Criminal Court* tidak memiliki peran apabila kejahatan internasional terjadi di teritorial negara bukan pihak, tetapi memiliki peran apabila kejahatan tersebut terjadi di teritorial negara pihak. Apabila negara bukan pihak yang menjadi korban kejahatan internasional, maka tidak ada tindakan yang dapat dilakukan oleh *International Criminal Court*, sebaliknya apabila negara pihak yang menjadi korban kejahatan internasional, maka *International Criminal Court* dapat ikut menyelesaikan kasus tersebut jika negara tidak mau atau tidak mampu untuk mengadili pelaku.

Kata Kunci : Kejahatan Internasional, Negara Bukan Pihak, Mahkamah Pidana Internasional.

ABSTRACT

The international criminal law recognizes the term of the State Party of Rome Statute (state party) and the Non-State Party of Rome Statute (non-state party). State party is a country which is bound by and subject to the Rome Statute, when international crimes (the most serious crimes) occurred in the state party, then the International Criminal Court can prosecute the accused if the country is unwilling or unable to prosecute. In contrast with non-state party, this country is not bound and not subject to the Rome Statute so it complicates the International Criminal Court to prosecute the accused of international crimes from the Non-State Party of Rome Statute or non-state party.

The purpose of this research is to know the role of the International Criminal Court in response to international crimes especially to the Non-State Party of Rome Statute that occurred after the Rome Statute entered into force and the act of the countries of international crime victims over the deeds of the accused from the Non-State Party of Rome Statute. This research used the juridical normative method with the secondary data source.

The results of this research demonstrate that the International Criminal Court has no role when international crime occurs in the territory of non-state party, but it has a role when the crimes occurs in the territory of state party. If the non-state party who became the victim of international crime, then no action could be taken by the International Criminal Court, on the other hand, if the state party who became the victim of international crime, then the International Criminal Court can settle the case if the state is unwilling or unable to prosecute the accused.

Keywords: International Crime, Non-State Party, International Criminal Court.